

# APEC 2020 BAGI INDONESIA: MITRA ATAU PEMANGSA?

**Baiq L. S. W. Wardhani**

Dosen Jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIP Unair, Surabaya

## **Abstract**

*The essay explores the opportunities dan challenges faced by Indonesia in her economic mathers. Employing various literature, it argues that Indonesia has not yet ready to compete in trade liberalisation, i.e APEC 2020. The 1998 financial crisis has badly hit Indonesian economy and it has not been fully recovered since then. Entering the free market competiton , many experts claim Indonesia will be inundated by foreign goods and services as our economies has been weaken to compete with those from overseas. If Indonesia can not make APEC to capitalize our own benefits, APEC would cause more harm than benefit for our economy.*

**Keywords:** *APEC, free market, Indonesian economy*

**H**ampir dua dasawarsa Indonesia bergabung dalam APEC, super- regionalisme

Petri,1999:2) terbesar di Asia-Pasifik. APEC yang diprakarsai oleh Australia pada tahun 1989, merupakan respon atas saling ketergantungan ekonomi di antara negara-negara yang berada di kawasan itu. Anggota APEC saat ini terdiri dari 21 negara yang sangat beragam kemampuan dan potensi ekonominya, mulai dari yang terlemah seperti Vietnam sampai yang terkuat seperti Jepang dan AS.<sup>1</sup> Keberagaman itu diharapkan menciptakan rasa kebersamaan (*sense of community*) dalam wadah kerjasama saling mengisi dan terpadu sehingga menciptakan kondisi kondusif bagi peningkatan kemakmuran semua anggotanya sekaligus mempersiapkan mereka menghadapi perdagangan bebas. Bermula dari sekedar forum dialog ekonomi, APEC berkembang lebih besar dan kuat dengan dukungan presiden Bill Clinton pada pertemuan di Seattle tahun 1993 yang menjadikan APEC sebagai pertemuan resmi tahunan. Selama menjadi anggota AP EC, Indonesia secara aktif memanfaatkan organisasi ini sebagai sarana memperkuat perekonomiannya. Bahkan Indonesia pernah menjadi tempat pertemuan KTT APEC pada tahun 1994 yang diselenggarakan di Bogor. KTT Bogor telah melahirkan Deklarasi Bogor yang menandai salah satu tahapan penting bagi agenda APEC yaitu dengan ditetapkannya target waktu pembukaan pasar bebas dan terbuka, yaitu tahun 2010 bagi negara maju dan 2020 bagi negara berkembang. Setidaknya sampai sebelum krisis ekonomi tahun 1997, beberapa kegi atan APEC menjadi agenda utama pemerintah untuk menggairahkan ekonomi nasional sekaligus sebagai wahana mempersiapkan negara kita menyongsong era perdagangan bebas. Krisis keuangan yang melanda Asia mempengaruhi kerjasama di antara negara-negara yang terkena dampak krisis itu. Namun misi APEC tidak bisa berbalik (*irreversible*). APEC diharapkan memegang janjinya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memperbaiki standar kehidupan para anggotanya. Inilah yang menjadi tulang punggung utama (*backbone*) kerjasama APEC (Ali, 2000:7).

Kondisi perekonomian Indonesia yang memprihatinkan setelah krisis mengundang pertanyaan: bagaimanakah posisi Indonesia dalam APEC pada tahun 2020? Apakah APEC dapat menjadi mitra pengembangan ekonomi bagi kesejahteraan rakyat Indonesia, atau sebaliknya, APEC hanya menjadi pemangsa perekonomian nasional? Artikel ini akan membahas tentang

berbagai permasalahan yang sedang dan akan dihadapi Indonesia sebagai negara dalam menghadapi liberalisasi perdagangan pada tahun 2020.

### Harapan Indonesia dalam APEC

Komitmen multilateralisme Indonesia didasarkan pada asumsi bahwa perekonomian nasional menjadi lebih mampu bersaing secara internasional. Dengan masuknya Indonesia dalam APEC, Indonesia mau tidak mau harus siap berintegrasi dalam rejim liberalisasi ekonomi yang semakin menjadi model yang dianut oleh banyak negara sebagai model sukses pertumbuhan ekonomi. Berdasar hal tersebut terdapat beberapa asumsi dasar yang mendasari ambisi Indonesia bergabung dalam APEC. *Pertama*, regionalisasi ekonomi diharapkan memberi Indonesia ruang gerak yang lebih luas untuk meninggalkan pola ekonomi statis menuju ekonomi dinamis yang berlandaskan liberalisasi. Bahkan pada tingkat tertentu ada harapan Indonesia untuk melakukan *reaching-out* ekonomi, karena kegagalan relatif kerjasama ekonomi intra-ASEAN. Sebelum terjadinya krisis ekonomi Asia pada tahun 1997, kondisi perekonomian Indonesia sering digambarkan dengan ungkapan optimisme seperti *booming, emerging, promising, conducive*, dan sejenisnya. Sekalipun tampilan ekonomi Indonesia tidaklah sebaik Singapura, banyak orang menaruh harapan akan semakin meningkatnya perekonomian di masa datang. Hal ini terbukti dengan meningkatnya arus investasi, baik dari sesama anggota APEC maupun non-APEC. Dengan optimisme seperti itu Indonesia yakin akan keuntungan yang akan diperolehnya dari APEC. Seperti diinginkan oleh negara-negara berkembang lainnya, APEC diharapkan tidak sekedar menjadi *free trade* tetapi juga dapat melaksanakan *fair trade*.

Pada dasarnya Indonesia jauh-jauh hari sudah mempersiapkan diri menghadapi globalisasi. Mulai tahun 1980-an pemerintah telah mengambil berbagai langkah deregulasi dan debirokratisasi dan terus melakukan perbaikan. Persiapan ini didasarkan pada kondisi nyata bangsa Indonesia sendiri yang memiliki potensi untuk bersaing di pasar bebas, yaitu jumlah sumber daya manusia (SDM) yang besar sekaligus pasar yang besar, ketercukupan sumber daya alam (SDA) serta upah tenaga kerja yang lebih murah. Persiapan menuju pasar bebas yang telah dilakukan itu antara lain, dalam bidang deregulasi investasi, pemerintah telah memperkenankan kepemilikan modal oleh asing. Kelonggaran ini telah memberikan kemudahan pihak asing untuk lebih banyak berinvestasi di Indonesia. Walaupun terdapat kekurangan di beberapa hal, kebijakan ini membantu Indonesia untuk mempersiapkan diri lebih baik menghadapi pasar bebas sekaligus untuk meraih keuntungan maksimal. (Wuryandari 1997: 71) Ketersediaan yang cukup SDM dan SDA dapat merupakan berkah juga beban sekaligus. SDA yang banyak namun tidak berkualitas tidak banyak bermanfaat bagi kemajuan bangsa. Sementara itu SDM yang berkualitas cenderung memilih bekerja di luar negeri karena sarana yang tidak memenuhi di dalam negeri. SDM yang melimpah tanpa didukung ketrampilan SDA hanya akan cenderung dinikmati oleh korporasi asing, dan rakyat lokal hanya sebagai penonton. Belajar dari beberapa kasus, berkah SDM yang melimpah justru melahirkan pemiskinan penduduk lokal dan melahirkan dislokasi sosial akut, seperti yang terjadi di kasus Exxon-Mobil Aceh dan Freeport Papua.

*Kedua*, berkaitan dengan faktor pertama, adalah keinginan Indonesia untuk meraih *image* internasional yang positif terhadap kemajuan ekonominya. Globalisasi ekonomi memberi peluang Negara untuk memperlihatkan *performance* ekonominya. Dengan kata lain, kekuatan ekonomi suatu negara diukur dari seberapa banyak negara tersebut memberikan sumbangan terhadap perkembangan ekonomi kawasannya (Muna, 1997: 94). Negara-negara tetangga Indonesia seperti Singapura, Korea Selatan, Hong Kong dan Taiwan mendapat julukan sebagai NIEs (*Newly Industrializing Economies*). Sementara Malaysia dan Thailand tumbuh hampir menyamai NIEs. Secara umum oleh Bank Dunia pertumbuhan ekonomi kawasan Asia Pasifik digambarkan sebagai Kejayaan Asia Timur. Dipicu oleh kesuksesan itulah pemerintah RI ingin mensejajarkan diri dalam predikat tersebut.

Dalam konteks ini pula Indonesia tidak ingin terjebak dalam keadaan yang diistilahkan sebagai *export pessimism* yang beranggapan bahwa ekspor dari negara berkembang tidak akan mampu menembus pasar negara maju (Hughes, 1992:12). Pesimisme ekspor itu melanda banyak negara berkembang, dan ketidakpercayaan diri ini menyebabkan arus ekspor negara berkembang tidak banyak ditemui di negara maju. Tentu saja pesimisme ekspor bukanlah satu-satunya penyebab, karena banyak lagi faktor lain yang turut berperan. Namun setidaknya bergabungnya Indonesia dalam APEC adalah upaya menepis anggapan tersebut, apalagi ada kesempatan untuk itu. *Ketiga*, Indonesia memiliki kepentingan politis-strategis untuk menjadi sekutu dekat AS. Bagi Indonesia, secara strategis keterlibatan AS dalam APEC merupakan simbol kedekatannya dengan AS. Bagi AS, keterlibatannya dalam APEC merupakan simbol yang memperkuat kesahihan kehadirannya di kawasan Asia-Pasifik. Terdapat kebutuhan timbal balik pada hubungan AS dengan anggota APEC lainnya. Komitmen Indonesia pada APEC nampak lebih kuat setelah Pertemuan Bogor 1994 yang kehadiran Presiden Clinton sangat diharapkan saat itu. APEC bukan saja menjadi ajang liberalisasi ekonomi tetapi juga menjadi tempat berkonsultasi masalah-masalah regional (Petri 1999: 5)<sup>2</sup>

### **Kondisi Nyata Indonesia**

Seberapa siapkah Indonesia menghadapi pasar bebas? Apa sajakah yang telah dilakukan Indonesia dalam menyambutnya? Walaupun ditargetkan Indonesia memasuki pasar bebas itu pada 2020, saat ini saja sudah dirasakan banyaknya penderitaan kita. Pasar bebas dalam beberapa hal telah menimbulkan dampak negatif bagi perekonomian nasional, seperti makin lebarnya jurang si kaya dengan si miskin dan melemahnya kontrol pemerintah dalam perekonomian. Perekonomian nasional lebih banyak dikuasai pihak asing dengan dijualnya aset-aset penting negara yang menguasai hidup orang banyak. Sejak bergabung dengan APEC, Indonesia berusaha melakukan beberapa persiapan, seperti (a) kemitraan usaha dan modal ventura yang merupakan kerjasama terpadu pengusaha besar dengan pengusaha kecil di tingkat nasional; (b) kemitraan melalui jalur kota kembar (*sister city*) dengan pihak luar negeri yang dimaksudkan untuk mengambil manfaat saling menguntungkan dari hubungan-hubungan sosial, budaya, perdagangan, pariwisata, dan alih teknologi<sup>3</sup>; (c) meningkatkan daya saing industri tekstil dan perkayuan (Irewati 1997:52).

Melakukan kemitraan antara pengusaha besar dengan kecil maupun antara negara maju dengan negara berkembang, bukanlah pekerjaan mudah. Di satu pihak, ada keinginan untuk bersama-sama menggairahkan perekonomian masing-masing pihak, namun di pihak lain ada beberapa hal yang tidak bisa begitu saja diberikan secara mudah/gratis kepada pihak lain. Di pihak yang kuat ada keengganan untuk mentransfer kelebihan kepada pihak yang lemah. Hal ini konsisten dengan sifat dasar ideologi liberalisme. Sebagai contoh, sebagai negara yang secara teknologi masih jauh tertinggal, Indonesia mengalami hambatan dalam bidang transfer teknologi dari negara maju, sehingga tujuan kemitraan dalam *sister city* tidak bisa terwujud secara nyata. Bidang pertekstilan yang menjadi salah satu andalan ekspor Indonesia, juga mengalami berbagai kendala. Tekstil dan pakaian jadi Indonesia tidak mampu bersaing dengan tekstil dari Cina yang mutunya tinggi dan semakin merambah dunia (Samhadi, *Kompas* 20/5/2006:34).

Dibandingkan dengan China dan India, sektor industri Indonesia masih tertinggal jauh dalam banyak hal. Data dari *United Nations Conference on Trade and Development*, China merupakan pemasok dunia terbesar ketiga untuk barang dan kesembilan terbesar untuk jasa komersial. Sementara India sudah mampu bersaing di teknologi informasi (IT) di tingkat internasional. Pendapatan India dari industri IT mencapai 36 miliar dollar AS pada tahun 2006. Sementara China, India dan sebagian negara APEC naik kelas dalam perindustrian, Indonesia bukan hanya tinggal kelas tetapi justru turun kelas. Nilai ekspor Indonesia di produk teknologi tinggi berada di tingkat terbawah (dengan pendapatan 4.850 juta dollar AS) dibandingkan dengan negara-negara APEC lainnya: China (107.543 juta dollar), Singapura (71.421 juta dollar AS),

Korea (57.161 juta dollar AS), Malaysia (47.042 juta dollar AS), Thailand (18.203 juta dollar AS) (Samhadi, *Kompas* 20/5/2006) Menurut Emil Salim, hal yang ironis bahwa China dan India yang tidak memiliki sumber daya alam topis seperti Indonesia bisa menjadi raja ekonomi di Asia (Salim, *Tempo Interaktif*, 17/12/2004:np).

Dari waktu ke waktu industri nasional mengalami kemunduran, bahkan dalam beberapa sektor mengalami kemandegan (*stagnant*) atau deindustrialisasi (Astono, *Kompas* 20/5/2006:35) Bagaimana mungkin Indonesia yang secara potensial memiliki hampir semua komponen produksi untuk mampu mengembangkan industrinya secara maksimal justru mengalami deindustrialisasi? Kondisi ini diperparah sejak krisis moneter 1997. Jangankan bersaing di sektor industri berteknologi tinggi, di industri manufaktur saja (pupuk, keramik, gas, tekstil, kayu dan sektor lain yang hanya mengandalkan sumber daya alam), kita tidak mampu menggarapnya. Indonesia yang dulu menjadi eksporter minyak, akibat kecerobohan manajemen sekarang menjadi importer minyak. Dengan kondisi demikian industri nasional semakin terpukul akibat kerawanan BBM (*Kompas* 1/6/2006: 17). Demikian pula di industri pertanian, Indonesia sebagai negara agraris justru menjadi importer kebutuhan dasar pangan seperti beras, kedelai, susu, garam, buah-buahan dan berbagai produk pertanian lain (Hidayati, *Kompas* 20/5/2006:38) Pemerintah lebih suka mengajak rakyat menjadi boros dengan seringnya membeli kebutuhan dasar (yang sebenarnya bisa kita penuhi sendiri) dari luar negeri untuk menutup kebutuhan dalam negeri. Pemerintah lebih memanjakan para pedagang daripada petani yang dirugikan oleh masuknya barang impor (Maryoto, *Kompas* 20/5/2006:39) Padahal jika pemerintah bijaksana dan taktis, Indonesia mampu mengembangkan teknologi pangan dan pertanian sendiri yang manfaat jangka panjangnya lebih positif tanpa harus menggantungkan diri pada pasokan luar negeri.

Jika ketergantungan ini terus berlangsung maka tidak mengherankan jika bangsa kita akan jadi konsumen saja di pasar bebas dengan membajirnya barang dan jasa asing di dalam negeri. Kita tidak akan mampu menjadi tuan rumah di negeri kita sendiri. Jangankan mampu bersaing di produk teknologi tinggi, untuk memenuhi kebutuhan dasar pun kita tidak mampu. Suatu hal yang ironis bahwa bergabungnya Indonesia dalam APEC sebagai mitra dan sarana mencapai kemakmuran justru menjadi pemangsa bagi kita sendiri. Jika hal ini berlangsung terus sampai 2020, maka Indonesia hanya mampu berhenti sebagai pasar raksasa dengan daya beli lemah karena tidak memiliki daya saing kuat di belantara pasar terbuka. Ketika menjadi tuan rumah KTT APEC tahun 1994 di Bogor Indonesia mencanangkan tekadnya untuk mewujudkan liberalisasi itu pada tahun 2020, tanpa memperkirakan sejauh manakah kesiapan nasional kita. Indonesia berharap banyak pada liberalisasi ekonomi untuk meningkatkan taraf kesejahteraan nasional. Indonesia terseret dan menyerah pada para pendukung neo-liberal yang mengagungkan pasar bebas, seolah-olah tidak ada alternatif lain, seperti yang pernah disuarakan oleh Margareth Thatcher dan Ronald Reagan (Gomez, ny: 2; Friedman 2005: np) yang kemudian disetujui oleh Mantan Presiden Suharto yang menyatakan bahwa siap atau tidak siap Indonesia harus memasuki pasar bebas.

Kondisi ekonomi Indonesia yang centang perentang diperburuk oleh beberapa faktor, baik faktor kesalahan manusia maupun faktor yang bersifat natural. Indonesia belum sepenuhnya mampu bangkit dari krisis. Indonesia tidak saja diterpa krisis keuangan dan ekonomi namun juga krisis yang sering disebut-sebut sebagai “krisis multidimensi”, yang telah melemahkan sendiri bernegara. Berbagai persoalan besar di tingkat nasional belum menemukan jalan keluarnya seperti konflik berbasis etnis, terorisme, otonomi daerah yang belum mantap, krisis BBM dan krisis energi, krisis kepemimpinan, belum di patuhinya peraturan hukum, hutang luar negeri yang semakin membengkak, serta persoalan sejenisnya. Berbagai kesulitan ini ditambah pula dengan beberapa bencana alam yang secara beruntun menimpa Indonesia, mulai tsunami, tanah longsor, gempa bumi, dan sebagainya. Semua persoalan itu menyerap dana dan energi pemerintah dan rakyat sehingga Indonesia nampak semakin tidak berdaya menghadapi pasar bebas. Sementara itu investor asing pun makin undur langkah melihat kondisi Indonesia yang demikian parah. Selain faktor yang telah disebutkan di atas, ketertinggalan Indonesia di bidang investasi dibandingkan

dengan negara-negara tetangga lainnya disebabkan oleh beberapa faktor penghambat klasik, antara lain tingkat korupsi yang tinggi, infrastruktur yang tidak memadai, birokrasi pemerintah yang berbelit-belit, peraturan perpajakan yang rumit, kualitas SDM yang rendah serta instabilitas kebijakan (Astono, *Kompas* 20/5/2006: 35) Hadi Soesastro berargumen bahwa kebijakan Indonesia menghadapi globalisasi (termasuk bergabung dalam APEC dan AFTA) lebih didasarkan pada “pertimbangan obyektif apa yang bisa dicapai negara-negara Asia Timur lainnya...dan [keinginan mereka] untuk berlomba meliberalisasi perekonomiannya agar lebih menarik investasi global”. Soesastro menambahkan, pemerintah tidak bijaksana dalam kebijakan ekonominya karena tidak mendorong tumbuhnya persaingan sehat di dalam negeri dengan memberi keistimewaan pada golongan tertentu (Samhadi, *Kompas* 20/5/2006:34). Padahal persaingan sehat di dalam negeri merupakan modal persaingan di pasar bebas.

Selain faktor-faktor internal Indonesia, hambatan menuju pasar bebas juga datang dari faktor eksternal. Dalam pasar bebas tentu masing-masing negara ingin melindungi industrinya agar tidak “dimangsa” oleh negara asing. Dengan berbagai aturan tarif dan non-tarif negara maju berupaya menghalangi masuknya produk dari negara berkembang. Hambatan-hambatan non-tarif seperti anti-dumping, *ecolabelling*, serta hambatan-hambatan yang dikaitkan dengan isu-isu non-perdagangan seperti kondisi HAM, merupakan senjata ampuh untuk menangkalkan masuknya produk negara berkembang. Untuk menguasai pasar dunia, negara-negara di Eropa saja melindungi produksi pertaniannya sedemikian rupa. Amerika Serikat juga melakukan hal yang sama. AS telah mengalokasikan subsidi sampai 80 % untuk sektor pertaniannya (*Pikiran Rakyat* 15/5/2006:np) Untuk menaklukkan pasar dunia, negara maju melakukan tiga langkah, yaitu mengambil pasar di negara lain, mengambil energi di negara yang kaya sumber daya alam, dan bagaimana menaruh posisi yang tepat untuk menyebarkan pengaruh politik, artinya menyebarkan hegemoni agar memperoleh akses politik besar di negara yang diincar. Akses politik besar berdampak pada akses untuk menguasai pasar negara berkembang.

### **Harapan Tinggal Harapan?**

Tiga langkah yang disebutkan di atas sudah dilakukan oleh negara maju di Indonesia. Dengan demikian, harapan akan terjadinya kemitraan melalui APEC semakin tidak menentu.

Sejak dilanda krisis keuangan yang diikuti dengan krisis multidimensi, harapan Indonesia pada APEC mulai menurun. Kegairahan yang ditunjukkan pada awal tahun 1990-an ketika APEC baru dibentuk, tidak nampak lagi. Setidaknya terdapat dua hal yang menyebabkan surutnya antusiasme Indonesia pada APEC. *Pertama*, selama krisis ekonomi Asia, APEC tidak banyak berperan dalam membantu memperbaiki atau memulihkan kondisi terpuruk Indonesia. Bahkan Singapura yang merupakan anggota APEC, negara tetangga terdekat Indonesia sekaligus terkaya, justru memanfaatkan kesulitan ekonomi Indonesia dengan tidak berusaha mencegah pelarian dana dari Indonesia ke Singapura. Singapura seolah-olah memegang prinsip ‘*beggar your neighbour*’ terhadap Indonesia. Jatuhnya Indonesia ke dalam krisis 1997 membuat Indonesia secara *de facto* memiliki daya beli rendah dan punya akses lebih kecil untuk berkiprah di pasar bebas (wawancara Hardianto dengan B. Herry Priyono, *Kompas* 3/6/2006:8).

*Kedua*, APEC yang diharapkan mampu menjadi tulang punggung perekonomian anggotanya ternyata tidak berdaya merespon kesulitan ekonomi yang mereka hadapi. Maka wajar dipertanyakan apakah sumbangan APEC di saat-saat anggotanya dilanda krisis. Keberlangsungan APEC juga patut diragukan. Kegairahan Indonesia dalam APEC menurun drastis sejak krisis itu. Dalam situasi seperti ini APEC lebih banyak dilihat sebagai ajang hegemoni AS dan Jepang.<sup>4</sup> Dua negara ini membutuhkan pasar yang dapat menyerap produk-produk domestik mereka, namun AS, terutama, enggan membantu pasarnya yang terpuruk. Dan *ketiga*, terdapat pergeseran isu APEC dari isu perdagangan bebas menjadi isu politis. Hal ini ditunjukkan oleh lemahnya komitmen AS pada pertemuan puncak APEC Oktober 2001. Presiden George W. Bush lebih banyak membahasa perang melawan terorisme dengan Presiden China, Jiang Zemin dan Presiden

Rusia, Vladimir Putin, presiden Indonesia Megawati dan PM Malaysia Ahmad Badawi. Melihat perkembangan ini diperkirakan bahwa APEC akan sulit memfokuskan dirinya pada tujuannya semula yaitu mengurangi hambatan-hambatan perdagangan dan investasi (Lincoln, 2001:1). Kegairahan perdagangan di kalangan anggotanya menjadi menurun sehingga APEC tidak lagi bisa disandarkan sebagai pemantik gairah menuju persaingan di pasar bebas.<sup>5</sup>

Melihat kondisi ekonomi Indonesia yang semakin terpuruk setelah krisis moneter, Indonesia perlu menilik kembali keputusan-keputusan yang pernah diambilnya. Misalnya, dukungan mantap Indonesia dalam berbagai KTT APEC secara over-optimistis Indonesia melangkah menuju liberalisasi ekonomi. Padahal kondisi ekonomi nasional Indonesia sebenarnya secara ideologis tidak sesuai dengan ideologi ekonomi liberal yang merupakan nafas APEC. (Muna 1997:96) Bagi Indonesia, globalisasi dengan pasar bebasnya melahirkan ketidaksetaraan (*inequality*) yang makin parah, pelemahan (*disempowerment*) dan pemiskinan (*impoverishment*). Swasono menjelaskan bahwa kesalahan yang dibuat Indonesia adalah, pemerintah telah membiarkan kedaulatan pasar menggusur kedaulatan rakyat. Yang dituju oleh pasal 33 UUD 1945 bukanlah pembangunan Indonesia yang bukan semata-mata mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi pembangunan di Indonesia yang menjunjung tinggi asas kekeluargaan/kekerabatan yang tidak nepotistik<sup>6</sup>

Pertanyaan yang perlu dikemukakan adalah, jika Indonesia kalah bersaing di pasar bebas, apa yang akan terjadi? Edward Said mempertanyakan sampai kapan libera lisme itu akan berlangsung? Menurutnya, kegagalan negara untuk mengatasi kekalahannya bersaing dalam sistem pasar bebas akan melahirkan krisis baru:

“For if the global system starts to break down, if more and more people suffer the consequences of a dearth of social services, if more and more powerlessness characterises the political system, then crises will begin to emerge.” (Said 2000: np)

### Kesimpulan

Melihat kondisi perekonomian kita dewasa ini kita tidak akan mampu bersiang dalam pasar bebas melalui kerjasama regional manapun. Dengan semakin dekatnya batas waktu yang ditetapkan bagi Indonesia memasuki liberalisasi perdagangan APEC pada tahun 2020, Indonesia siap atau tidak siap harus menghadapi kenyataan untuk menerima pasar bebas. Berdasar kondisi nya ta saat ini, bagi Indonesia APEC lebih cenderung dilihat sebagai pemangsa daripada mitra. Dengan segala keterbatasan yang ada, apakah *free-trade* bisa juga menjadi *fair trade* bagi Indonesia? Bergabungnya Indonesia ke dalam APEC lebih didasarkan pada pragmatisme daripada pertimbangan-pertimbangan ideologis. Indonesia cenderung hanya mengikuti perkembangan yang terjadi di sekitarnya daripada mempertimbangkan kekuatan diri. Ekonomi pasar bebas bukan merupakan resep manjur perekonomian Indonesia yang masih belum berkembang seperti Indonesia. Namun dengan diputuskannya Indonesia untuk bergabung dalam APEC, keputusan ini tidak bisa ditarik kembali. Sehingga resiko apa pun yang akan terjadi harus mampu diatasi.

Harapan-harapan Indonesia dalam APEC banyak yang kandas. APEC ternyata tidak memberikan kemitraan produktif seperti yang diharapkan dari sebuah lembaga regional, tidak pula memberikan tanggapan positif terhadap krisis ekonomi anggotanya. Dalam kondisi demikian, Indonesia nampak makin gamang dan mendua mengha dapi globalisasi. Agar tidak menjadi mangsa dalam persaingan bebas, pemerintah tetap harus melindungi produk dalam negerinya. Keharusan ini karena secara nyata kompetensi daya saing produk Indonesia masih sangat lemah. Ada baiknya Indonesia bercermin kepada China dan India yang memiliki keseriusan, keuletan, konsistensi, disiplin, inovatif, atau Inggris dan Amerika yang pada saat mereka sedang menjadi negara berkembang menolak perdagangan bebas. Indonesia sebaiknya memiliki rencana pembangunan jangka panjang yang berpihak ke rakyat, melakukan *re-*

*positioning* dan *re-visioning* agar Indonesia tidak hanya mampu sebagai obyek globalisasi dan sekedar konsumen pasar bebas seperti saat ini. Diperlukan konsep yang jelas mengenai perekonomian nasional tanpa harus selalu menjadi korban arus globalisasi dan meninggalkan kewajiban global kita sebagai warga negara dunia.

## Daftar Pustaka

- Aloi, S., *Keynote Address by Ambassador Serbini Ali, Executive Director of APEC Secretariat at Seminar on Challenges and Opportunities in Asia-Pacific* (Yogyakarta, Indonesia, 2000).
- Astono, B. 2006. Industri Nasional Berada di Gigi "R". *Kompas* 20/5/2006.
- Friedman, M. 2005. *On Europe and The Euro, China, Inflation, Inflation and The End of History*, diakses dari [http://www.digitalnpq.org/artic les/nobel/37/12-01-2005/milton\\_friedman](http://www.digitalnpq.org/artic les/nobel/37/12-01-2005/milton_friedman) diakses tanggal 6 Juni 2006.
- Gomez, R. ny. *Globalized Neoliberalism: Refutaion and Debacle*. Los Angelis: California State University, diakses dari <http://web.whittier.edu/academic/facultymasters/PCCLAS/DrGomezPCCL ASlecture.pdf> Dibuka tanggal 6 Juni 2006.
- Hardianto, B. J. S. 2006. "Indonesia di Tengah Globalisasi". *Kompas* 3/06/2006.
- \_\_\_\_\_. 2006. "Upaya Mengembalikan Semangat Kebangsaan", *Kompas*, 11 Maret 2006.
- Hidayati, N. 2006. "Menyiapkan Produk Unggulan tahun 2030". *Kompas* 20/5/2006.
- Hughes, H. 1992. *The Danger of Export Pessimism: Developing Countries and Industrial Markets*. Panama, San Francisco, International Centre for Economic Growth.
- Irewati, A. 1997. *Indonesia dan APEC dalam Perkembangan Ekonomi Po litik Internasional*. Jakarta, PPW LIPI.
- \_\_\_\_\_. *Kompas* 1/6/2006. "Industri Nasional Makin Tertekan."
- Lincoln, E. J. 2001. *Taking APEC Seriously*. Policy Brief no. 92. Diperoleh dari <http://www.brookings.edu/comm/policybriefs/pb92.htm>. Dibuka tanggal 22 Mei 2006.
- Maryoto, A. 2006. "Pertanian yang Tidak Lagi Membagakan" *Kompas* 20/5/2006.
- Muna, M. R., Perdagangan Indonesia dan APEC dalam Konteks Dinamika Ekonomi Politik Internasional. dalam: Irewati, A. *Indonesia dan APEC dalam Perkembangan Ekonomi Politik Internasional* (Jakarta: PPW LIPI, 1997).
- Petri, P. A. 1999. *APEC and the Millennium Round*. Makalah yang dipresentasikan untk Konperensi "Towards APEC's Second Decade: Challenges, Opportunities, Priorities". APEC Study Centre Consortioum Conference (Auckland, New Zeal and. 31 May- 2 Juni 1999).
- \_\_\_\_\_. *Pikiran Pakyat* 15/05/2006. "Menyiasati Persaingan".
- Said, E. 2000. "Problems of Neoliberalism". Diperoleh dari: <http://www.zmag.org/Sustainers/Content/2000-09/20said.htm> 20/9/2000. Dibuka 6 Juni 2006.
- Salim, E. "Indonesia Belum Siap Hadapi Pasar Bebas". *Tempo Interaktif*, 17/12/2004.
- Samhadi, S. H. 2006. "Globalisasi dan Indonesia 2030." *Kompas* 20/5/2006.
- Swasono, S. 2002. "Sistem Ekonomi Indonesia". Dalam *Artikel*, tahun 1, no. 2.
- Wuryandari, G. 1997. Investasi Negara-negara APEC di Indonesia, dalam: Irewati, A. *Indonesia dan APEC dalam Perkembangan Ekonomi Politik Internasional*. Jakarta, PPW LIPI.